

BAB V

KESIMPULAN PENELITIAN

Definisi konseptual Implementasi Pendidikan Seks di Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia adalah penerapan dari rencana pengajaran untuk membentuk dan meningkatkan seseorang dalam kualitas fisik, intelektual dan moral, dalam topik seks, di Sekolah Menengah Atas Negeri yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia.

Implementasi Pendidikan Seks di Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia adalah penerapan dari rencana pengajaran untuk membentuk dan meningkatkan seseorang dalam kualitas fisik, intelektual dan moral, dalam topik seks di Sekolah Menengah Atas Negeri yang dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

Implementasi Pendidikan Seks di Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia memiliki tiga dimensi, pertama dimensi kognitif yang indikatornya: mengerti informasi biologis, mengerti risiko, dan mengerti batasannya. Kedua, dimensi afektif, yang indikatornya: berani berkata tidak, memiliki rasa tanggung jawab, menghormati orang lain, takut akan Allah, teguh bertahan. Ketiga, dimensi behavioral, yang indikatornya: meninggalkan godaan, dan terampil berkomunikasi.

Dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut:

Pertama, kecenderungan Variabel Implementasi Pendidikan Seks di Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia (Y) adalah sudah mengimplementasikan secara signifikan pada $\alpha < 0,05$.

Kedua, kecenderungan Dimensi Kognitif (X_1) adalah menuju mengimplementasikan secara signifikan pada $\alpha < 0,05$.

Ketiga, kecenderungan Dimensi Afektif (X_2) adalah sudah mengimplementasikan secara signifikan pada $\alpha < 0,05$.

Keempat, kecenderungan Dimensi Behavioral (X_3) adalah menuju mengimplementasikan secara signifikan pada $\alpha < 0,05$.

Kelima, kecenderungan Indikator Informasi Biologis (x_{1-1}) adalah menuju mengimplementasikan secara signifikan pada $\alpha < 0,05$.

Keenam, kecenderungan Indikator Mengerti Risiko (x_{1-2}) adalah menuju mengimplementasikan secara signifikan pada $\alpha < 0,05$.

Ketujuh, kecenderungan Indikator Mengerti Batasannya (x_{1-3}) adalah menuju mengimplementasikan secara signifikan pada $\alpha < 0,05$.

Kedelapan, kecenderungan Indikator Berani Berkata Tidak (x_{2-1}) adalah sudah mengimplementasikan secara signifikan pada $\alpha < 0,05$.

Kesembilan, kecenderungan Indikator Rasa Tanggung Jawab (x_{2-2}) adalah sudah mengimplementasikan secara signifikan pada $\alpha < 0,05$.

Kesepuluh, kecenderungan Indikator Menghormati Orang Lain (x_{2-3}) adalah menuju mengimplementasikan secara signifikan pada $\alpha < 0,05$.

Kesebelas, kecenderungan Indikator Takut Akan Allah (x_{2-4}) adalah sudah mengimplementasikan secara signifikan pada $\alpha < 0,05$.

Keduabelas, kecenderungan Indikator Teguh Bertahan (x_{2-5}) adalah menuju mengimplementasikan secara signifikan pada $\alpha < 0,05$.

Ketigabelas, kecenderungan Indikator Meninggalkan Godaan (x_{3-1}) adalah menuju mengimplementasikan secara signifikan pada $\alpha < 0,05$.

Keempatbelas, kecenderungan Indikator Terampil Berkomunikasi (x_{3-2}) adalah menuju mengimplementasikan secara signifikan pada $\alpha < 0,05$.

Kelimabelas, ketika dianalisa secara sendiri-sendiri, dimensi yang paling dominan dalam membentuk Implementasi Pendidikan Seks di Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia adalah dimensi Afektif (X_2).

Keenambelas, bila dijalankan melalui analisis secara bersama-sama, maka dimensi yang paling berperan adalah dimensi Behavioral (X_3).

Ketujuhbelas, masing-masing dimensi ternyata tidak saling memberikan kontribusi yang berarti dalam membentuk Implementasi Pendidikan Seks di Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia. Maksudnya, bahwa ketiga dimensi tersebut berjalan sendiri-sendiri dan tidak bersinergi dalam membentuk Implementasi Pendidikan Seks di Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia. Dalam artian, dimensi kognitif, afektif, behavioral tidak hadir secara bersama-sama dalam sebuah pengajaran.

Kedelapanbelas, ketika dianalisa secara sendiri-sendiri indikator yang paling dominan dalam membentuk Implementasi Pendidikan Seks di Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia adalah Teguh Bertahan (x_{2-5}).

Kesembilanbelas, ketika dianalisa secara bersama-sama, indikator yang paling dominan adalah Rasa Tanggung Jawab (x_{2-2}) yang didukung oleh Meninggalkan Godaan (x_{3-1}).

Keduapuluh, indikator-indikator ini tidak ternyata tidak saling memberikan kontribusi yang berarti dalam membentuk Implementasi Pendidikan Seks di Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia. Maksudnya, bahwa kesepuluh indikator tersebut

berjalan sendiri-sendiri dan tidak bersinergi dalam membentuk Implementasi Pendidikan Seks di Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia.

Hipotesa bahwa Implementasi Pendidikan Seks di Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia (Y) belum diimplementasikan ternyata tidak terbukti. Selain itu, hipotesa bahwa dimensi yang dominan adalah dimensi kognitif juga tidak terbukti. Hipotesa diambil mengingat dari saat ini hanya menekankan kognitif, berupa pelajaran biologi. Namun, ternyata di lapangan dimensi afektif telah mengambil peran penting (dominan) karena diberikan dalam kelas agama dan Bimbingan Konseling (BK).

Hipotesa indikator moderator latar belakang yang dominan adalah penjurusan, mengingat pelajaran biologi banyak diberikan dalam jurusan tertentu, yaitu MIPA. Namun demikian, ternyata latar belakang yang menentukan adalah provinsi. Hal ini disebabkan bahwa penerapan pelajaran ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi, bukan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, walaupun pemerintah pusat menetapkan bahan pelajaran dalam penjurusan MIPA, IPS, dan Bahasa, namun pelaksanaan di lapangan dilakukan atau diterapkan oleh pemerintah daerah provinsi.

Pertanyaan berikutnya yang mungkin dilontarkan adalah, bila pendidikan seks sudah diimplementasikan, mengapa banyak remaja tidak perawan. Tercatat 51% remaja di Jabodetabek, 54% remaja di Surabaya, 47% remaja di Bandung dan 52%

remaja di Medan tidak telah melakukan hubungan seks pranikah.¹ Di samping itu ada 2.000 remaja melakukan aborsi per tahun² dan 150.000 remaja terinfeksi HIV.³

Pertanyaan ini dapat dijawab dengan dua hal. Pertama, bahwa bila tidak terjadi pendidikan seks yang efektif, yaitu sesuai temuan penelitian ini bahwa domain kognitif, afektif dan behavioral tidak hadir secara bersama-sama dalam proses pengajaran, maka hasilnya tidak efektif. Dapat dikatakan bahwa Indonesia belum memiliki pendidikan seks, melainkan hanya berupa pendidikan kesehatan reproduksi saja, dan pelajaran Agama serta Bimbingan Konseling yang terpisah. Bila bahan tidak ada dan proses yang tepat tidak terjadi, maka hasilnya pun tidak efektif.

Kedua, di samping pendidikan seks, banyak faktor yang memengaruhi keputusan remaja melakukan seks pranikah, salah satunya adalah tidak adanya komunitas yang kuat, yang mendukung mereka dalam keputusan mereka untuk menjaga kesucian. Penelitian menyatakan bahwa otak remaja lebih sensitif terhadap “reward” atau hadiah berupa umpan balik dari teman-temannya, termasuk “reward” yang diberikan untuk perbuatan-perbuatan yang berisiko. Hal ini disebabkan bagian otak yang mengatur “reward system” sudah berkembang, namun bagian otak yang mengatur kognitif masih belum sepenuhnya berkembang.⁴ Selain itu, para remaja

¹ Liputan6, ‘BKKBN 51 Persen Remaja Jabotabek Tidak Perawan’, *Liputan6*, 28 November 2010 <<https://www.liputan6.com/news/read/308777/bkkbn-51-persen-remaja-jabotabek-tidak-perawan>>. Diakses: 21 Maret 2019.

² ‘Ada 2000 Remaja Lakukan Aborsi Setiap Harinya’, 7 Maret 2016 <<http://video.metrotvnews.com/nsi/VNx6xmak-ada-dua-ribu-remaja-lakukan-aborsi-setiap-harinya>>. Diakses: 21 Maret 2019.

³ Indriyani Astuti, ‘150 Ribu Remaja Di Indonesia Hidup Dengan HIV’ (Media Indonesia, 16 Maret 2018) <<http://mediaindonesia.com/read/detail/150271-150-ribu-remaja-di-indonesia-hidup-dengan-hiv>>. Diakses: 31 Maret 2019.

⁴ Dustin Albert, Jason Chein, and Laurence Steinberg, ‘The Teenage Brain : Peer Influences’, *Current Directions in Psychological Science*, 22.2 (2013), 114 <<https://doi.org/10.1177/0963721412471347>>

sulit untuk menghentikan (menekan rem) dalam meresponi hal-hal yang bersifat impulsif.⁵ Para remaja ini mengalami penurunan (kurangnya) pengontrolan diri (*self control*) yaitu kemampuan untuk menekan emosi, keinginan, dan tindakan yang tidak pantas atau tidak seharusnya.⁶ Dengan demikian, di samping perlu pengarahan dalam bentuk pendidikan seks, para remaja ini perlu memiliki komunitas-komunitas yang memiliki keputusan yang sama yaitu untuk tidak melakukan seks pranikah.

⁵ Ibid. 118.

⁶ B J Casey and Kristina Caudle, 'The Teenage Brain : Self Control', *Current Directions in Psychological Science*, 22.2 (2013), 82 <<https://doi.org/10.1177/0963721413480170>>.

BAB VI

IMPLIKASI

Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam mengubah pengetahuan dan motivasi seseorang, yang pada akhirnya akan mengubah perilakunya. Melihat hal ini, maka peran penelitian ini adalah menelaah pendidikan seks yang ada saat ini ada dalam kurikulum Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia, dengan tujuan untuk memberikan usulan setelah melihat “update” yang terjadi di lapangan saat ini. Hasil penelitian ini diperkaya dengan adanya *Focus Discussion Group* yang melibatkan beberapa pihak terkait tema pendidikan seks di Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang terlibat dalam Pendidikan seks bagi para remaja. Bab ini berisi kebijakan, strategi dan upaya-upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan Implementasi Pendidikan Seks di Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia.

A. Kebijakan

Kebijakan pertama, mewujudkan Implementasi Pendidikan seks di Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia (Y) yang mengakomodasikan tiga domain pendidikan yaitu kognitif, afektif dan behavioral, dalam sebuah proses pengajaran. Hal ini terkait pembenahan materi dan metode pengajaran.

Kebijakan kedua, untuk memasukkan aspek afektif dalam proses pengajaran pendidikan seks, mengangkat aspek afektif merupakan aspek yang dominan namun belum dimasukkan dalam Kompetensi Dasar dalam kelas. Aspek afektif ini dijabarkan dalam materi dan metode pengajaran.

Kebijakan ketiga, yaitu untuk mendorong Pemerintah Daerah terlibat dalam mewujudkan Implementasi Pendidikan seks di Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia.

Kebijakan keempat, untuk mendorong terjadinya sinergi antar instansi pemerintah dan LSM yang terlibat dalam pendidikan seks bagi para remaja di Indonesia.

Kebijakan kelima, untuk memberikan pembekalan bagi para guru biologi yang saat ini menjadi ujung tombak pendidikan seks di Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia.

B. Strategi

Strategi didefinisikan sebagai pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan atau kebijakan tertentu. Di bagian ini akan dibahas lima strategi untuk menjawab lima kebijakan yang diusulkan di atas. Namun, sebelum strategi dipaparkan, penulis merasa perlu untuk mengusulkan perubahan tujuan dalam pendidikan seks di Indonesia. Saat ini nampaknya belum ada “pendidikan seks” yang mencakup tiga domain pendidikan (kognitif, afektif, behavioral) dengan tujuan untuk mendorong remaja untuk menjaga kesucian. Yang ada adalah pendidikan “kesehatan reproduksi” dengan kemampuan dasar “Mampu mengaitkan struktur, fungsi, proses dan kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi manusia.” Siswa mempelajari proses reproduksi pada manusia, penyakit-penyakit yang berhubungan

dengan alat reproduksi, dan pengetahuan tentang bagaimana menjaga kebersihan alat-alat reproduksi sehingga dapat terhindar dari penyakit yang menyerang alat reproduksi.⁷ Dengan demikian dibutuhkan perubahan mendasar dalam konsep pendidikan seks, yang penulis sebutkan sebagai revolusi pendidikan seks. Kamus Besar Bahasa Indonesia menulis arti kata “revolusi” adalah perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang.

Perubahan ini dimulai dari perubahan tujuan pembelajaran, dari “mengajarkan kesehatan reproduksi” atau Kespro, menjadi “mendorong remaja menjaga kesuciannya” yang penulis namakan sebagai Kespro Plus. Budaya di Indonesia masih men-tabu-kan isu seks, sehingga istilah “Pendidikan Seks” bukan istilah yang tepat untuk digunakan.

Pendidikan seks tidak dapat ditunda lagi, mengingat media sudah jauh lebih terbuka daripada guru dan orangtua. Bahkan dalam sebuah Sekolah Dasar Negeri di Bogor, 81,6% anak sudah terpapar media berkonten pornografi. Dari populasi itu, 46% terpapar pornografi berat.⁸ Namun demikian, pihak pemerintah nampaknya belum melihat hal ini sebagai prioritas, menganggap hal ini tabu, atau justru mengkhawatirkan dampaknya. Ketua PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), Sarsanto Wibisono Sarwono mengakui bahwa selama ini memang ada penolakan untuk memasukkan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum pendidikan dasar hingga menengah. Hal ini disebabkan oleh kesalahpahaman mengenai pendidikan seks itu sendiri:

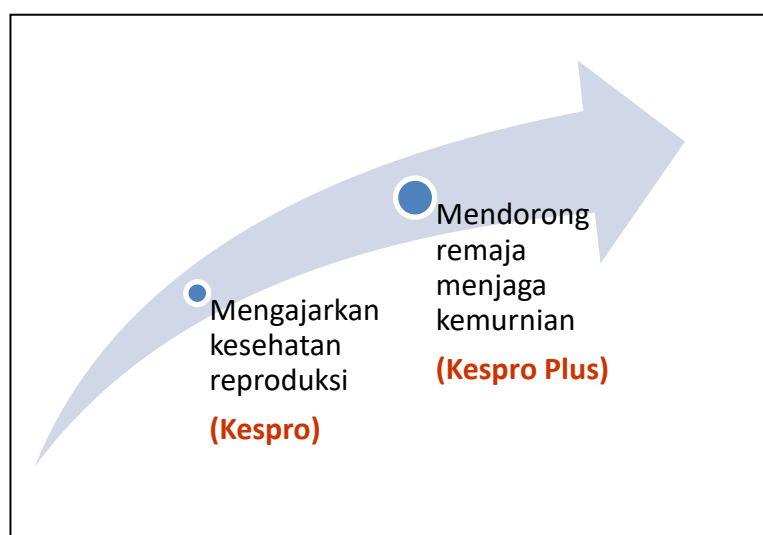
⁷ Purnomo et al, *Biologi Kelas XI* (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009)

⁸ Dwi Rochmawati, Asri M. Arsyati, and Supriyanto, ‘Gambaran Keterpaparan Media Berkonten Pornografi Pada Anak-Anak Peserta Didik Kelas 4, 5 Dan 6 Di SDN Kayu Manis 2 Kota Bogor’, *Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*, 2.5 (2019), 351–60
<<http://dx.doi.org/10.32832/pro.v2i5.2524>>

"Seperti pisau bermata dua, apa pun yang kita kerjakan tujuannya ini harus beri tahu, ini untuk *say no to sex*, bukan untuk menjadi pengetahuan mereka untuk melakukan seks. Sebab dengan hubungan seks ini kita beritahukan bahwa kemungkinan akan terjadi infeksi menular seksual, terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, tertular HIV. Jadi untuk mencegah itu cuma satu, jangan melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan, kuncinya menang di situ. Ini yang tidak dibicarakan oleh orang lain,"⁹

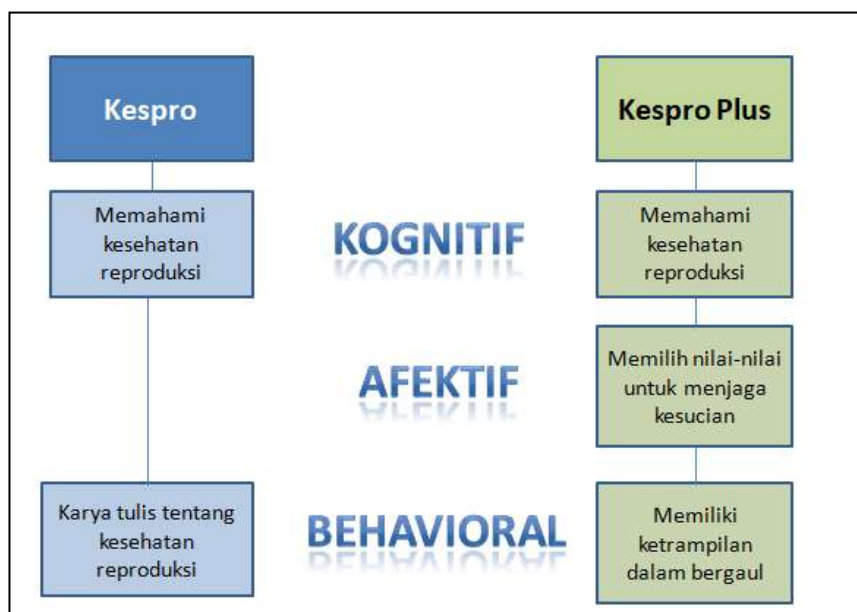
Penulis sendiri mengalami tantangan ketika menyebarkan survei penelitian ini kepada teman yang memiliki remaja sekolah di SMAN. Komentar yang dilontarkan adalah, "Untuk apa pendidikan seks? Kita dulu tidak pernah diberi pendidikan seks juga bisa punya anak." Pandangan inilah yang perlu diubah, bahwa pendidikan seks bukanlah pendidikan untuk mengajarkan seks, melainkan untuk mencegah remaja melakukan seks sebelum menikah. Dengan demikian perlu perubahan mendasar dalam tujuan pendidikan kesehatan reproduksi di Indonesia, seperti gambaran di bawah ini:

Gambar 14.
Tujuan Pendidikan Seks



⁹ Sri Lestari, 'Pelajaran Kesehatan Reproduksi Ditolak MK', 2015
<https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151102_indonesia_pendidikanseks>
[accessed 6 December 2019].

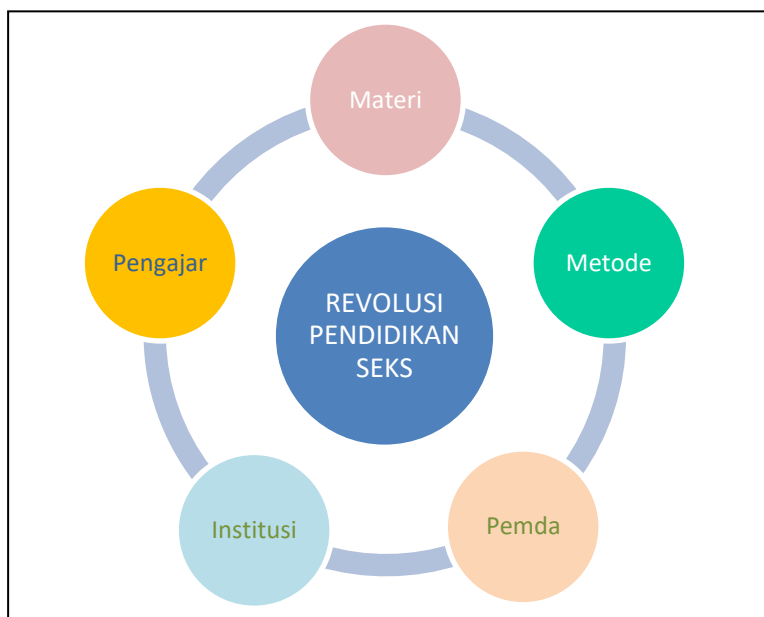
Gambar 15
Tiga Domain dalam Pendidikan Seks



Gambar di atas menjelaskan perbedaan antara Kespro dan Kespro Plus. Dalam domain kognitif, Kespro dan Kespro Plus mengajarkan hal yang sama, yaitu memahami kesehatan reproduksi. Namun Kespro tidak memiliki domain afektif, sedangkan tujuan afektif dalam Kespro Plus yaitu untuk menanamkan nilai-nilai sehingga remaja memilih untuk mengadopsi nilai-nilai yang sejalan dengan menjaga kesucian mereka (tidak melakukan seks pranikah). Dalam aspek behavioral atau psikomotorik, Kespro menugaskan para siswa untuk membuat karya tulis tentang kesehatan reproduksi, sedangkan Kespro Plus melatih siswa untuk memiliki keterampilan dalam bergaul, sehingga menghindarkan mereka dari godaan seks pranikah. Perbedaan yang besar dalam domain afektif dan behavioral akan menghasilkan siswa dengan karakteristik yang berbeda pula.

Terkait revolusi pendidikan seks yang perlu diwujudkan, berikut ini lima hal yang masuk dalam pertimbangan dan usulan dalam pendidikan seks di Indonesia:

Gambar 16
Revolusi Pendidikan Seks



1. Strategi dalam Bidang Materi: Perlunya Membangun Materi yang Melibatkan Aspek Kognitif, Afektif, Behavioral Secara Sinergi.

Saat ini, dalam pelajaran Biologi yang mengajarkan pendidikan Kesehatan Reproduksi hanya diajarkan dua Kompetensi Dasar (KD) dalam aspek kognitif dan 2 KD dalam aspek psikomotoris (behavioral). Agar pengajaran menjadi efektif sesuai dengan tujuan yang baru, yaitu “mendorong remaja menjaga kemurnian” mereka, maka dibutuhkan materi pengajaran yang memuat tujuan-tujuan yang bersifat kognitif, afektif dan behavioral contohnya sebagai berikut:

a) **Tujuan pembelajaran kognitif**

- 1) Mengerti organ-organ reproduksi
- 2) Mengerti bahwa hubungan seks dapat menyebabkan kehamilan
- 3) Mengerti risiko hubungan seks, seperti penyakit menular seksual, HIV/AIDS.
- 4) Menilai dampak negatif hubungan seksual pada mental/emosional seseorang
- 5) Mengevaluasi dampak hubungan seksual pranikah pada pernikahan mereka kelak
- 6) Menyimpulkan potensi negatif hubungan seksual pranikah yang dapat menghancurkan masa depan mereka.
- 7) Mengkontraskan kehidupan seks bebas dan kehidupan yang mempertahankan kesucian.
- 8) Memformulasikan dan menetapkan batas-batas pergaulan yang sehat sebelum terlibat dalam pergaulan.
- 9) Mengerti cara menjaga bagian tubuh yang sangat pribadi agar tidak disentuh orang.
- 10) Mengerti pentingnya menjauhi godaan yang akan mendorong seseorang terlibat dalam hubungan seksual pranikah (contoh: pornografi, berdua dengan pacar di tempat sepi, dan lainnya).
- 11) Mengerti pentingnya memiliki tujuan hidup untuk memberi motivasi dalam menjaga kemurnian.
- 12) Dapat merumuskan tujuan hidup atau cita-citanya dalam sebuah kalimat.
- 13) Mampu menganalisa situasi-situasi yang berpotensi menjerumuskan pada perbuatan yang tidak senonoh.
- 14) Dapat menciptakan alasan-alasan yang tepat untuk menolak kencan atau ajakan untuk berbuat hal-hal yang tidak senonoh.

b) Tujuan pembelajaran afektif

- 1) Menghargai diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan yang unik dan spesial
- 2) Menghargai makna dan tujuan hidup yang dimiliki setiap orang sebagai pemberian dari Tuhan. Dengan demikian ia tidak menyia-nyiakan hidup dan masa depannya.
- 3) Menghargai keuntungan-keuntungan tidak melakukan hubungan seks pranikah.
- 4) Memiliki rasa takut dan hormat pada Tuhan, sehingga takut untuk berbuat dosa (melakukan hubungan seks pranikah).
- 5) Memiliki keberanian untuk menolak ajakan untuk berbuat tidak senonoh
- 6) Mengadopsi sikap penolakan terhadap hubungan seksual pranikah setelah mengetahui berbagai akibat negatifnya.
- 7) Merasa belum mampu untuk menanggung akibat hubungan seksual pranikah, baik secara fisik, emosional, mental maupun sosial
- 8) Merasa belum mampu untuk bertanggung jawab membina sebuah keluarga
- 9) Memiliki penghargaan yang tinggi atas kesucian orang lain.
- 10) Menghargai pendapat orang lain tentang hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas (contohnya menghargai teman yang menjaga kesucian, menolak untuk digandeng, dan lainnya).
- 11) Setuju untuk tidak membuka media berkonten pornografi karena dapat menjadi kecanduan.
- 12) Mengambil tanggung jawab untuk masa depannya.

- 13) Memilih untuk “menghilangkan” semua risiko seks bebas dengan berpantang seks, bukan “mengurangi” risiko dengan alat kontrasepsi, karena tidak ada metode kontrasepsi yang aman 100%

c) Tujuan pembelajaran behavioral

- 1) Memiliki keterampilan untuk menjawab tekanan dari teman-teman (*peer pressure*) untuk melakukan hal yang tidak senonoh.
- 2) Memiliki keterampilan untuk berkomunikasi (baik lisan maupun melalui media) yang sopan sehingga tidak “mengundang” perlakuan yang tidak senonoh.
- 3) Memiliki ketrampilan untuk mengkonsumsi media dengan bijak, sehingga menghindari dari godaan perilaku seksual pranikah.
- 4) Membuat rencana untuk mengendalikan hasrat seksual bila hal tersebut terjadi, contohnya dengan mengalihkan fokus pikiran, berolah raga, atau melakukan hal lain.
- 5) Membuat keputusan untuk menjaga kesucian dan tidak melakukan hubungan seksual pranikah.

Sebuah model pendidikan seks yang pernah penulis hadiri, yang mencakup ketiga aspek ini adalah “No Apologies: Kebenaran tentang Hidup, Cinta dan Seks” yang dilakukan oleh Focus On the Family Indonesia. Beberapa topik yang dibahas dalam empat modul utama di antaranya: jati diri, persahabatan (termasuk batasan-batasannya), media (termasuk pornografi) dan topik-topik terkait seksualitas serta risiko-risiko hubungan seks pranikah. Pada akhirnya diharapkan bahwa remaja dapat menghargai hidup bebas tanpa penyesalan karena berpantang seks sebelum menikah.

Materi pendidikan seks perlu dituangkan dalam bentuk “kekinian” yang menarik bagi para remaja, lengkap dengan desain yang sesuai dengan selera anak muda, dan bukan sekedar dalam bentuk buku teks. Materi perlu membuka “komunikasi” dengan para remaja, dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk merespon, contohnya dengan mengisi kuis, memilih benar atau salah, menulis respon pribadi mereka, dan lainnya.

Pada intinya, materi pendidikan seks Kespro Plus yang diusulkan oleh penulis bertujuan untuk mendorong remaja menolak seks pranikah yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan behavioral, dilengkapi dengan desain kekinian serta bersifat komunikatif, sehingga menarik bagi para remaja.

2. Strategi dalam Bidang Metode: Perlunya Membangun Sistem Pengajaran yang Melibatkan Aspek Kognitif, Afektif, Behavioral Secara Bersamaan.

Hasil dari penelitian menyatakan bahwa tiga dimensi kognitif, afektif dan behavioral ternyata tidak saling terkait alias berjalan sendiri-sendiri. Dalam penerapan di lapangan, hal ini diterjemahkan sebagai dimensi kognitif diberikan dalam kelas atau mata pelajaran yang berbeda dengan dimensi afektif dan behavioral. Memang di Indonesia, pendidikan seks masih berupa pengetahuan kesehatan reproduksi dalam pelajaran biologi, dengan empat kompetensi dasar yang terdiri dari dua kompetensi dasar kognitif dan dua kompetensi dasar psikomotoris/behavioral. Dimensi afektif kemungkinan diberikan dalam pelajaran agama (takut akan Tuhan, menjaga kesucian diri, dan lainnya), atau disampaikan dalam pelajaran BK (Bimbingan Konseling). Karena itu dapat diduga bahwa implementasi pendidikan seks tidak maksimal hasilnya.

Dari hasil kajian teori pendidikan, dibutuhkan ketiga aspek kognitif, afektif dan behavioral untuk muncul dalam sebuah proses pembelajaran agar hasil dari proses pembelajaran tersebut dapat efektif dan berdampak. Bila prosesnya keliru, maka tidak akan memberikan hasil yang diinginkan. Untuk itu, dibutuhkan tambahan afektif dalam pelajaran biologi khususnya dalam topik kesehatan reproduksi, atau untuk lebih efektif lagi, diberikan pelajaran khusus mengenai pendidikan seks yang mencakup ketiga aspek pendidikan tersebut.

Pelajaran ini dapat berupa seminar sehari yang wajib dihadiri oleh siswa saat orientasi masuk sekolah, yang akan diulang dengan penekanan yang berbeda setiap awal tahun ajaran baru. Atau, dapat pula mendedikasikan dua hari belajar untuk mengadakan seminar khusus mengenai pendidikan seks. Di dalam seminar ini terdapat tujuan kognitif, afektif, dan behavioral sekaligus. Dengan demikian, siswa dapat mengkaitkan pengetahuan reproduksi dengan perasaan positif untuk menjaga kemurnian, lalu kemudian membuat keputusan untuk berpantang seks sebelum menikah.

Salah satu contohnya adalah Seminar “No Apologies” yang telah menjangkau sekitar 100.000 siswa sejak 2007. Seminar ini telah dilakukan di berbagai sekolah, baik swasta maupun negeri, di seluruh Indonesia dan mendapatkan penerimaan yang baik. Dilakukan sehari penuh di aula sekolah, membahas pengetahuan mengenai reproduksi, perasaan-perasaan remaja yang sedang jatuh cinta, hingga mendorong keputusan untuk tidak melakukan seks pranikah. Kelebihan lain dari seminar ini adalah dibawakan oleh kakak-kakak pembina yang relatif masih muda sehingga mudah diterima oleh para remaja, dan disampaikan dengan metode yang “fun” dan menyenangkan bagi para remaja.

3. Strategi dalam Bidang Metode: Perlunya Membangun Metode yang Menekankan Afektif dalam Implementasi Pendidikan Seks di Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia

Hasil penelitian menyatakan bahwa dimensi afektif adalah dimensi yang dominan. Hal ini dapat diterjemahkan dengan penjelasan bahwa ketika seseorang tidak tergerak perasaannya atau tertarik, maka ia cenderung tidak akan mendengarkan apa yang disampaikan apalagi melakukannya. Karena itu, penting untuk membangun metode yang menggerakkan perasaan dan memotivasi para remaja atau menekankan dimensi afektif yang memang menjadi dimensi yang dominan. Selama ini, empat kompetensi dasar yang ada dalam pelajaran biologi terdiri dari dua kompetensi dasar kognitif dan dua kompetensi dasar psikomotor/behavioral. Tidak ada kompetensi dasar afektif.

Salah satu ciri remaja adalah konsep ATM alias “Amati Tiru Modifikasi.” Mereka menyerap apa yang mereka lihat dari media juga orangtua, lalu mereka meniru dengan melakukan modifikasi di sana sini. Remaja tidak tertarik dengan semua hal yang “biasa saja” atau hal-hal yang sama, yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Untuk itu, pendidikan seks di SMAN perlu dimodifikasi sesuai dengan selera anak muda, contohnya dengan menggunakan media yang menarik, seperti film atau animasi yang relevan bagi mereka, atau alat peraga lain yang menarik.

Sebagai contoh penggunaan film untuk menyentuh aspek afektif dari para peserta didik adalah film “Dua Garis Biru.” Film ini diawali dengan seorang gadis yang keluar dari kamar mandi dengan wajah yang kuyu dan bibir terkutup yang menyerahkan hasil *test pack* kehamilan pada pacarnya. Muncul dua garis biru dari alat tes kehamilan yang dipegangnya. Langsung Bima menatap Dara dengan nanar.

Bibirnya pucat. Seketika itu juga, masa depan mereka berubah total. Tidak ada lagi canda tawa keceriaan anak-anak SMA, tetapi yang tersisa hanya rasa ketakutan, waswas dan kalut. Tidak ada lagi masa-masa pacaran yang indah dan mesra, tetapi rasa cemas berkelanjutan dan beratnya tanggung jawab yang harus mereka hadapi. Film seperti ini menggugah perasaan anak-anak remaja. Mereka turut terkejut, tertawa, khawatir, sedih dan menangis mengikuti perjalanan tokoh-tokoh yang mereka lihat di film tersebut.

Agar tidak membosankan, pelajaran pendidikan seks juga perlu disampaikan dalam bentuk lain, selain informasi satu arah, yaitu dalam bentuk “games” atau “roleplay” atau bermain peran untuk menggali perasaan para peserta didik. Ibu Rusminingsih dari SMAN 78 menerapkan bermain peran dalam pendidikan seks. Contohnya, dalam mengajarkan dominasi pria ketika meminta pacarnya untuk berhubungan seks. Ia meminta dua pasang pelajar untuk mempraktekkan dialog yang mungkin terjadi dalam situasi seperti itu. Pasangan pertama diminta mengiyakan, dan pasangan kedua diminta menolak. Kemudian guru menjelaskan bahwa ternyata ditolak juga “tidak apa-apa” karena seringkali remaja pria meminta hubungan seks dengan pacarnya hanya untuk menunjukkan dominasinya. Melalui “roleplay” ini juga, para remaja dapat menggali perasaannya dan memahami motivasi pihak lain. Kedua hal ini menyangkut dimensi afektif dari pendidikan seks. Selain itu, melalui bermain peran mereka juga belajar mempraktekkan dimensi behavioral, yaitu mempraktekkan langsung apa yang perlu dikatakan dan dilakukan bila situasi seperti itu terjadi.

4. Strategi dalam Kaitannya dengan Pemerintah Daerah: Perlunya Memberi Dorongan pada Pemerintah Daerah dalam Implementasi Pendidikan Seks di Sekolah Menengah Atas Negeri di Wilayahnya.

Sesuai hasil analisa penelitian, bahwa indikator moderator yang paling berperan adalah provinsi, maka dibutuhkan dorongan khusus bagi para gubernur untuk menerapkan pendidikan seks di wilayahnya. Direktur Bina Ketahanan BKKBN, Eka Sulistia Ediningsih S.H., mengatakan bahwa memang gubernur yang berhak untuk memerintahkan kebijakan yang bersifat menyeluruh dalam wilayah provinsi tersebut. Untuk itu, dibutuhkan peran pemerintah pusat untuk memotivasi dan menggerakkan para gubernur untuk menerapkan pendidikan seks di wilayah mereka.

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa:

“bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dengan demikian, pemerintah daerahlah (dalam hal ini provinsi) yang memikul tanggung jawab memberdayakan para remaja dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dengan cara menolong mereka mengatakan “tidak” pada seks bebas. Selain itu, dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 mengenai Pendidikan Nasional dikatakan bahwa:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dengan demikian, Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menyelenggarakan pendidikan seks atau mengarahkan sekolah-sekolah dan para guru untuk menyelenggarakan Kespro Plus. Di samping itu, dalam UU 20 tahun 2003 pasal 26 disebutkan mengenai pendidikan nonformal yang dapat diadakan untuk menunjang pendidikan formal:

“(3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

(4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.”

Karena dasar hukum yang diberikan sudah cukup kuat, maka para Gubernur dapat merancang sebuah lembaga atau menugaskan/menetapkan lembaga-lembaga tertentu untuk menyampaikan pendidikan seks bagi remaja, maupun penyuluhan bagi para orangtua (pemberdayaan orangtua). Sejalan dengan dasar hukum ini, maka Pemerintah Daerah dapat mengatur anggaran untuk pelaksanaan program ini.

Pemerintah Daerah dapat menciptakan sebuah gerakan bersama instansi pemerintah dan LSM untuk mencanangkan program Kespro Plus, dengan cara menggalakkan penyuluhan atau seminar ke sekolah-sekolah, memasang spanduk-spanduk, menciptakan motto contohnya “Katakan Tidak pada Seks Pranikah” atau “No sex. No drugs. No problem!”

5. Strategi dalam bidang Institusi: Perlunya Membangun Koordinasi dan Sinergi di Antara Departemen dan Pihak Terkait.

Melihat fenomena terkait perilaku seksual yang terjadi di antara para remaja di Indonesia, dibutuhkan berbagai pihak untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan penanggulangan, sehingga para remaja Indonesia terhindar dari jerat seks bebas dan segala permasalahannya yang sangat merusak. Masalah yang dihadapi oleh sebuah negara adalah sangat kompleks dan berskala sangat besar. Untuk itu dibutuhkan koordinasi dan kerja sama antar departemen. Dua departemen atau lebih dapat membentuk sebuah hubungan kerja berdasarkan “mutual understanding” demi

mencapai tujuan yang sama dan menciptakan nilai bagi masyarakat melalui kerja sama demi penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan pembagian tanggung jawab yang jelas.¹⁰ Dari FGD ditemukan bahwa kesulitan koordinasi dari departemen-departemen adalah siapa (departemen mana) yang mendapat nilai bila program berhasil. Di samping itu, budget yang tidak merata, di mana satu departemen mendapatkan budget jauh lebih besar daripada departemen lainnya.¹¹ Untuk itu, dari awal perlu ditetapkan kontribusi yang diharapkan dari tiap departemen dan apa yang akan diterima oleh departemen tersebut.

Beberapa instansi terkait yang dapat berperan adalah:

Pertama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Salah satu fungsinya adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.¹²

Kedua, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan

¹⁰ Michal Fink and others, 'A Model for Cooperation between Government Ministries Executive Summary', in *The Civil Service Commission's and the JDC Institute for Leadership and Governance's Program for Senior Civil Servants*, 2013, pp. 2.

¹¹ 'Focus Discussion Group "Implementasi Pendidikan Seks Di Sekolah Menengah Atas Di Indonesia."'

¹² Puan Maharani, 'Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Tahun 2015-2019', 2019, p. 14.

masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Salah satu fungsi Kemendikbud adalah perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan.¹³

Ketiga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.¹⁴ Di dalam BKKBN terdapat Direktorat Bina Ketahanan Remaja yang bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan pengembangan program, pelembagaan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan ketahanan remaja.¹⁵

Di samping kementerian, kerja sama ini dapat melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan berbagai organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, secara khusus yang ruang lingkupnya keluarga dan remaja, contohnya Focus On the Family Indonesia, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, dan lainnya.

Demi keefektifan kerja dan membangun pengukuran kinerja yang baik, maka dibutuhkan pembagian tugas yang spesifik dari setiap departemen, termasuk KPI (*Key*

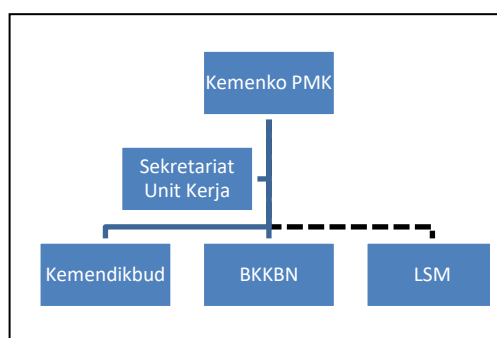
¹³ Anies Baswedan, 'Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan', 2015, p. 2.

¹⁴ Sugiri Syarief, 'Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/Per/B5/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional', 2011, p 2.

¹⁵ Ibid. p. 68.

Performance Indicator) yang jelas. KPI ditetapkan supaya tidak terjadi kesenjangan di mana satu departemen yang bekerja keras namun penilaian keberhasilan diberikan pada departemen yang lain. Dengan demikian, setiap departemen dapat “merayakan kemenangan” ketika program tersebut berhasil. Berikut ini usulan struktur organisasi tim khusus yang terdiri dari departemen-departemen terkait, dan tugas serta KPI mereka. Untuk sementara proyek dalam bahasan ini dinamakan program Kespro Plus (Kesehatan Reproduksi Plus) yang telah mengakomodir ketiga aspek pendidikan: kognitif, afektif, behavioral.

Gambar 17
Struktur Organisasi Kerja Sama Antar Departemen



Tabel 23
Kerja Sama Antar Departemen

Kemenko PMK	BKKBN	Kemendikbud	LSM
KEKUATAN DEPARTEMEN			
<ul style="list-style-type: none"> Memiliki fungsi koordinasi yang dapat melibatkan berbagai departemen lain. 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki kepakaran khusus dalam topik remaja. Memiliki jaringan kelompok remaja GenRe (Generasi Berencana) di seluruh Indonesia Memiliki 23.579 Pusat informasi 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki otoritas langsung dalam penetapan kurikulum dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Memiliki otoritas dan jaringan para guru di seluruh Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki kepakaran dan spesialisasi tertentu dalam isu remaja atau keluarga. Tidak birokratis, sehingga dapat bergerak cepat. Memiliki ruang

	<p>dan Konseling – Remaja (PIK) di 34 provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> Memiliki Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di seluruh Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki jaringan orangtua murid di seluruh Indonesia. 	<p>lingkup yang belum dijangkau oleh pemerintah, yaitu remaja di luar SMAN, seperti remaja di sekolah swasta, remaja tidak bersekolah, dll.</p>
FUNGSI UMUM			
<p>Fungsi koordinasi program dan koordinasi dengan pemerintah daerah (Gubernur)</p>	<p>Fungsi mempersiapkan materi dan pembentukan komunitas di luar struktur sekolah.</p>	<p>Fungsi penerapan di SMAN dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan wilayah Provinsi.</p>	<p>Fungsi pendukung</p>
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB			
<ul style="list-style-type: none"> Memberikan usulan-usulan kebijakan pada pemerintah mengenai program Kespro Plus Melakukan koordinasi dan evaluasi program Kespro Plus. Menjadi “host” untuk pertemuan koordinasi, dan seminar-seminar untuk memperlengkapi pihak-pihak yang terlibat dalam program Kespro Plus. Melakukan penelitian demi perkembangan program. Melakukan 	<ul style="list-style-type: none"> Membuat modul pendidikan Kespro Plus yang melibatkan tiga aspek pendidikan: kognitif, afektif, behavioral. Mengembangkan dan mengedukasi kelompok remaja (Genre) dalam hal Kespro Plus. Mengembangkan dan mengedukasi orangtua melalui kelompok BKR. Memberi pembinaan pada guru BK (Bimbingan Konseling) di sekolah-sekolah dalam topik Kespro Plus. 	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan modul pendidikan KesproPlus yang telah materinya disiapkan bersama dengan BKKBN. Mencetak dan menyebarkan bahan-bahan edukasi Kespro Plus untuk siswa dan orangtua (yang materinya telah disiapkan oleh BKKBN) Mengumpulkan para guru BK dan guru Biologi untuk mendapatkan pengarahan dari BKKBN. Mengumpulkan 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan edukasi Kespro Plus dalam komunitas-komunitas remaja yang belum terjangkau oleh sekolah dan/atau BKKBN. Menjadi salah satu “pasukan” yang dapat digunakan dalam edukasi pelajar maupun orangtua di SMAN. Memberikan update mengenai perkembangan remaja di lapangan.

<p>koordinasi dengan LSM-LSM untuk memetakan remaja-remaja yang belum terjangkau, untuk kemudian diarahkan untuk diedukasi di bawah LSM atau BKKBN (GenRe)</p> <ul style="list-style-type: none"> Menjadi “host” untuk pelatihan bagi LSM dan mencetak pengajar-pengajar Kespro Plus tersertifikasi. 		<p>para orangtua untuk mendapatkan pengarahan mengenai bagaimana mengajarkan remaja dalam topik Kespro Plus (yang materinya telah disiapkan oleh BKKBN)</p>	
KPI UMUM			
<p>KPI umum (bersama): jumlah remaja yang telah dijangkau atau mendapatkan pelatihan/ pelajaran Kespro Plus di SMAN.</p>	<p>KPI umum (bersama): jumlah remaja yang telah dijangkau atau mendapatkan pelatihan/ pelajaran Kespro Plus di SMAN.</p>	<p>KPI umum (bersama): jumlah remaja yang telah dijangkau atau mendapatkan pelatihan/ pelajaran Kespro Plus di SMAN</p>	
KPI KHUSUS			
<ul style="list-style-type: none"> Menerbitkan laporan bersama hasil unit kerja Kespro Plus Menerbitkan hasil penelitian demografis mengenai remaja dan keluarga (bekerja sama dengan BKKBN) Berbagai pelatihan untuk pimpinan dan 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penjangkauan melalui GenRe dan PIK Jumlah penjangkauan melalui BKR Jumlah pelatihan untuk guru dan orangtua (bekerja sama dengan Kemendikbud) Menerbitkan hasil penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sekolah yang telah mengadopsi program Kespro Plus. Jumlah pelatihan untuk guru dan orangtua (bekerja sama dengan BKKBN) Jumlah orangtua yang telah mengikuti seminar 	<ul style="list-style-type: none"> KPI sesuai dengan target masing-masing LSM

<p>pelaku program Kespro Plus dari departemen terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pengajar Kespro Plus bersertifikasi. 	<p>demografis mengenai remaja dan keluarga (bekerja sama dengan Kemenko PMK)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modul-modul yang telah dipersiapkan 	<p>pendidikan Kespro Plus bagi remaja mereka.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penyuluhan kepada kantor-kantor Depdikbud di wilayah. 	
--	--	--	--

6. Strategi dalam bidang Pengajar: Perlunya Memperlengkapi Para Guru dalam Implementasi Pendidikan Seks di Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia

a) Memimalkan Kendala Afektif Berupa Perasaan Malu atau Tabu

Dimensi afektif yang sangat dominan dapat mendorong secara positif, namun juga dapat memberi pengaruh negatif dengan menghalangi upaya-upaya pendidikan seks. Pendorong terbesar dapat menjadi penghalang terbesar pula. Yang paling dominan adalah perasaan malu atau tabu untuk membahas topik berkaitan dengan seks, dan juga ketakutan bila anak-anak justru dari tidak tahu menjadi tahu lalu melakukannya. Bp. Syukur Eko, guru biologi SMAN78, dalam FGD membagikan pengalamannya bahwa ketika ia hendak menjelaskan organ reproduksi dan memasang gambar, hal ini diprotes oleh sesama guru. Kendala ini tertanam dalam budaya Indonesia, dan tidak hanya dialami oleh guru, tetapi juga oleh orangtua. Faktor kultural ini berperan sangat besar dan butuh waktu untuk berubah.

Memang sulit untuk mengubah budaya sebuah bangsa, tetapi paling tidak kita dapat memberikan dorongan bagi para guru biologi dan guru BK untuk tidak lagi merasa tabu membahas topik seksualitas. Karena kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa remaja saat ini sudah jauh lebih tahu, jauh lebih cepat dan sudah

banyak mengerti bahkan melihat hal-hal terkait seksualitas, salah satunya dari paparan pornografi. Bahkan para guru dan orangtua cenderung tertinggal, karena anak-anak lebih dahulu mengetahui hal-hal ini dari media yang kecepatan menyebar hanya dalam satu kali “klik.”

Bila remaja sebenarnya sudah lebih mengerti dan sudah pernah mendengar/melihat hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas, maka ketika guru menjelaskan dalam bahasa yang “malu-malu” atau “abu-abu” serta hanya menyentuh masalah di permukaan saja, para remaja tidak tertarik untuk mendengarkan. Dengan demikian kecepatan guru dan orangtua, paling tidak harus sama dengan media.

b) Memperlengkapi dalam Materi dan Teknik Mengajar

Kompetensi dasar yang dimasukkan dalam materi biologi terdiri dari dua kompetensi dasar kognitif (analisis struktur dan analisis prinsip reproduksi, ASI, KB) dan dua kompetensi dasar psikomotor/ behavioral (dampak pergaulan bebas dan penyakit kelamin, serta karya tulis yang hubungannya dengan penyimpangan reproduksi). Namun, hasil penelitian menyatakan bahwa dimensi afektif cenderung “sudah diimplementasikan.” Dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) didapatkan bahwa para guru Bimbingan Konseling (BK) mengajarkan materi pendidikan seks dari sisi afektif saat mereka mengajar. Contohnya, mengangkat topik tentang bagaimana menolak permintaan pacar untuk tidur bersama. Selain itu, beberapa guru biologi mengajarkan kesehatan reproduksi dengan pendekatan yang sedikit berbeda, yaitu dengan memancing komentar peserta didik mengenai hal-hal yang berhubungan dengan seks. Setelah siswa ramai memberikan komentar dan suasana menjadi kondusif, guru memberikan materi pelajaran biologi yang bersifat kognitif. Guru tidak hanya berperan dalam menyampaikan materi yang bersifat kognitif (pelajaran

biologi), tetapi juga menggugah ketertarikan, perasaan, dan sekaligus memberikan rambu-rambu bagi siswa. Namun demikian, tidak semua guru mengajar dengan demikian. Ada kemungkinan bahwa sebagian besar guru hanya mengajarkan kompetensi dasar yang diminta (kognitif dan behavioral), tanpa menggugah sisi afektif siswa. Untuk itu, perlu diadakan pelatihan bagi para guru biologi dalam mengimplementasikan pendidikan seks melalui pelajaran biologi.

Perlunya pelatihan juga disampaikan oleh guru yang hadir dalam FGD. Ada sarana khusus berupa perkumpulan dan pelatihan para guru biologi. Dalam forum inilah pelatihan dapat diberikan. Kesulitan yang dipaparkan beliau adalah “seberapa jauh” atau “seberapa vulgar” pendidikan seks dapat disampaikan pada para murid, karena beliau menyadari bahwa ada murid yang sudah tahu jauh lebih banyak daripada yang lain, bahkan daripada gurunya sendiri, tetapi ada juga murid-murid yang masih “murni” bahkan yang tidak mengetahui apa arti masturbasi.

Selain itu, beliau membutuhkan kepastian atau dukungan, karena ketika berusaha mengajarkan dengan terbuka pada murid-murid, ada pihak lain yang menganggap hal itu terlalu vulgar. Contohnya, ada guru lain yang memprotes ketika guru biologi memasang gambar organ reproduksi di kelas. Alasannya, “Nanti murid yang tidak tahu malah jadi tahu.” Jadi batasan dan cara mengajar menjadi topik penting yang dibutuhkan oleh para guru.

Di samping itu, sebaik apapun modul pelajaran yang telah dipersiapkan, guru menjadi ujung tombak untuk mengajarkan modul atau bahan pelajaran tersebut kepada siswa. Untuk itu, perlu pelatihan khusus untuk para guru, terutama guru BK dan guru biologi. Pelatihan ini dapat dilakukan oleh Kemendikbud bekerja sama dengan BKKBN yang selama ini telah melatih para guru BK, karena salah satu fungsi

Kemendikbud adalah melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan.¹⁶

c) Menjalin Hubungan dan Komunikasi dengan Para Orang Tua

Hal yang juga berpengaruh dalam implementasi pendidikan seks di sekolah adalah dukungan dari orangtua. Ketika guru telah mengajarkan pendidikan seks seperti yang seharusnya di sekolah, kemudian remaja tersebut pulang dan bercerita pada orangtua yang masih memiliki halangan budaya, maka akan berpotensi orangtua menghalangi atau keberatan atas pengajaran pendidikan seksual di sekolah. Untuk itu, sekolah dapat melakukan pencegahan dan penguatan, dengan cara memberi informasi pada orangtua tentang hal-hal yang telah dibicarakan dengan anak-anak mereka di sekolah. Yang lebih baik lagi, sekolah dapat mengundang orangtua untuk bersama-sama memahami masalah ini dan bersama-sama mendidik para remaja. Orangtua juga membutuhkan pengetahuan dan pelatihan mengenai bagaimana mendidik anak-anak mereka dalam topik seksualitas.

Informasi dari peneliti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat FGD bahwa rata-rata orangtua murid di Indonesia adalah lulusan SMP. Data lain dari Biro Pusat Statistik menyatakan bahwa 41% angkatan kerja Indonesia hanya lulusan SD ke bawah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orangtua sendiri tidak memiliki pendidikan atau latar belakang yang memadai untuk menyampaikan pendidikan seks bagi para remaja mereka.

Bagaimana cara mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan orangtua dalam topik pendidikan seks ini? Orangtua sebagian besar sibuk bekerja. Selain itu,

¹⁶ Anies Baswedan, 'Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan', 2015, p. 2.

orangtua tidak memiliki organisasi khusus yang mengumpulkan mereka. Contohnya, ibu-ibu hamil dan balita dikumpulkan melalui Posyandu secara berkala. Atau, pekerja dapat dikumpulkan dan diberi pengarahan melalui pelatihan atau serikat pekerja di kantor. Tetapi, organisasi apa yang dapat mengumpulkan para orangtua? Tidak ada satu organisasi yang sama yang bisa menjadi wadah bagi para orangtua. Namun, sekolah dapat menjadi sarana untuk mengumpulkan dan “mendidik” para orangtua dengan cara memberikan penyuluhan dari waktu ke waktu, atau sekedar mengumpulkan para orangtua saat penerimaan siswa baru atau saat pengambilan rapor. Paling tidak, sekolah dapat menyampaikan hal-hal apa yang diajarkan pada siswa dalam Kespro Plus di sekolah, sehingga para orangtua dapat mendukung dan menguatkan di rumah.

7. Perlunya Penguatan Indikator Dominan “Teguh Bertahan” dalam Implementasi Pendidikan Seks di Sekolah Menengah Atas di Indonesia

Indikator yang paling dominan secara sendiri-sendiri dalam Implementasi Pendidikan Seks di Sekolah Menengah Atas di Indonesia adalah teguh bertahan. Pada akhirnya, ketika para remaja sudah mengerti dan memiliki pengetahuan tentang bahaya seks pranikah, mereka perlu memiliki keteguhan untuk tidak terlibat dalam seks pranikah dengan cara menekankan pentingnya menjaga kesucian hingga menikah, menghargai diri sendiri, dan mengendalikan dorongan seksual. Keteguhan ini menjadi bagian dari dimensi afektif. Perlu dilakukan penguatan-penguatan di dalam proses penyampaian pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan seks.

Penguatan ini dapat berasal dari orangtua yang dibekali untuk memberikan penguatan pesan-pesan pendidikan seks yang dilakukan di sekolah. Orangtua bukan saja memberikan peringatan mengenai bahaya seks, melainkan menanamkan nilai-

nilai spiritualitas yang akan mendorong anak mereka untuk menjaga kesucian sesuai norma-norma yang ada.

8. Perlunya Penguatan Indikator “Meninggalkan Godaan” untuk Memperkuat “Rasa Tanggung Jawab” dalam Implementasi Pendidikan Seks di Sekolah Menengah Atas di Indonesia

Bila dalam usia kanak-kanak seseorang belum banyak diberi tanggung jawab, maka sejalan dengan pertumbuhan seseorang menjadi remaja dan dewasa, ia mulai dibebankan berbagai tanggung jawab yang lebih besar. Mereka bersiap-siap untuk membangun kehidupan yang sukses di masa depan. Mereka mulai diberi tanggung jawab untuk mengelola uang jajan, mengatur waktunya sendiri, dan mengambil beberapa keputusan untuk dirinya. Namun ada batas-batas di mana para remaja belum mampu mengambil tanggung jawab, yaitu dalam hal hubungan seksual dan membentuk sebuah keluarga. Untuk menguatkan Implementasi Pendidikan Seks di Sekolah Menengah Atas di Indonesia, para peserta didik perlu mendapatkan pengarahan bahwa mereka bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka dalam hal pergaulan dengan lawan jenis. Mereka perlu berhati-hati dalam bergaul karena pada kenyataannya mereka tidak akan pernah siap menanggung dampak negatif akibat hubungan seks pranikah, apalagi menanggung sebuah keluarga. Film “Dua Garis Biru” menjadi film yang perlu ditonton oleh seluruh peserta didik untuk memberi pemahaman besarnya dan beratnya tanggung jawab membentuk keluarga dalam keadaan yang tidak siap mental dan jasmani. Mengingat mereka belum siap untuk melakukan hubungan seksual dan membangun keluarga, maka para peserta didik perlu didorong untuk menjauhi semua hal yang akan menggoda dan menyeret mereka dalam hubungan seks, seperti menjauhi media berkonten pornografi dan situasi-situasi yang akan membangkitkan rangsangan seksual mereka.

C. Upaya

Upaya di sini menjelaskan usaha-usaha yang akan dilakukan oleh penulis sehubungan dengan hasil penelitian ini. Berikut ini beberapa upaya yang direncanakan:

Pertama, penulis akan mengundang kembali dalam bentuk pertemuan tatap muka, yaitu berbagai pihak terkait isu pendidikan seks bagi remaja dan siswa Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia, untuk menyampaikan hasil temuan ini, sehingga dapat ditindaklanjuti bersama-sama. Dalam kesempatan Focus Group Discussion (FGD) sebelumnya telah diungkapkan permintaan dari pihak pemerintah untuk memberikan usulan pola kerja sama antar departemen. Untuk itu, pertemuan berikutnya akan mengundang pihak yang sama dan memaparkan usulan tersebut. Beberapa pihak yang akan diundang adalah: BKKBN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan berbagai LSM.

Kedua, dalam kaitannya dengan materi dan metoda, penulis bersedia memberikan usulan materi serta metoda yang dapat digunakan dalam Implementasi Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia, yang melibatkan dimensi kognitif, afektif dan behavioral.

Ketiga, dalam kaitannya dengan pengajar, maka penulis dapat menyarankan pelatihan “training for trainers” yaitu pelatihan bagi para guru Sekolah Menengah Atas Negeri dalam hal menyampaikan pendidikan seks berbasis karakter bagi para murid. Focus On the Family Indonesia secara khusus memiliki pelatihan bersertifikat bagi para pengajar pendidikan seks berbasis karakter. Pelatihan ini tidak terbatas bagi para guru SMAN saja, melainkan juga bagi “peer educator” atau rekan/teman

pendidik. Mengingat para remaja sangat rentan terhadap “peer pressure,” maka perlu dibangun komunitas-komunitas remaja yang berpegang pada prinsip menolak seks pranikah.

BAB VII

SARAN

Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah, namun berkaitan pula dengan berbagai pihak lain mengingat besarnya ruang lingkup dan tugas yang menanti. Untuk itu, saran-saran yang diberikan juga berkaitan dengan masing-masing instansi yang dapat berperan dalam Implementasi Pendidikan Seks di Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia. Saran-saran di bagian ini bersifat umum, karena hal-hal yang bersifat taktis dan praktis telah disampaikan dalam bagian strategi di atas, untuk diaplikasikan oleh pihak-pihak terkait.

1. Saran untuk Pemerintah

Untuk pemerintah, perlu memperkuat koordinasi atau membangun unit kerja khusus yang melibatkan berbagai instansi terkait Implementasi Pendidikan Seks di Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia. Instansi yang dapat berperan adalah Kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Pemerintah Daerah (Gubernur). Saran ini telah dijabarkan dengan detil dalam sub judul Strategi dalam disertasi ini.

Pemerintah menjadi pemegang peran terpenting mengenai pendidikan seks, karena pendidikan seks adalah sebuah program yang sifatnya nasional. Pemerintah

memiliki otoritas dan akses untuk menyebarluaskan program, selain memberikan batasan-batasan norma pendidikan seks yang sesuai dengan filosofi bangsa Pancasila. Sebelum pemerintah melihat pendidikan seks sebagai hal yang urgen dan mandatori, maka tidak bisa diharapkan pendidikan seks dapat dilaksanakan dengan baik di Indonesia, karena orangtua maupun guru tidak memiliki pengetahuan secara otomatis, tanpa bantuan dan dorongan dari pemerintah dalam skala nasional.

2. Saran untuk Para Guru

Untuk para guru Sekolah Menengah Atas Negeri, mengingat pentingnya peran mereka sebagai ujung tombak penyampaian informasi kesehatan reproduksi atau pendidikan seks pada para murid, perlu menyadari pentingnya aspek afektif untuk dimasukkan dalam pelajaran kesehatan reproduksi, walaupun hal tersebut tidak dimasukkan sebagai Tujuan Instruksional Umum dan Tujuan Instruksional Khusus dalam kelas. Memang perlu sedikit upaya ekstra dari pihak pengajar, mengingat belum adanya panduan khusus dari pemerintah melalui hal ini.

Dalam kisah Yusuf, dimensi yang sangat berperan (dominan) adalah dimensi afektif, yaitu: (1) Yusuf memiliki keberanian untuk menolak, (2) memiliki pengertian akan batasan-batasan yang boleh dan tidak, (3) merasa kepercayaan yang diberikan oleh Potifar perlu dipertanggungjawabkan dengan baik, bukan dikhianati, (4) Yusuf takut akan Tuhan, walaupun tidak ada yang melihat. Dengan demikian, dimensi afektif ini perlu ditekankan dan ditampilkan baik dalam materi maupun metode pengajaran Kespro Plus bagi para siswa.

3. Saran untuk LSM

Untuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berkiprah di bidang remaja dan keluarga, seperti FOFI (Focus On the Family Indonesia), PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), dan berbagai LSM lainnya perlu bersinergi untuk menghasilkan pemetaan mengenai program, strategi dan rencana ke depan, supaya terjadi sinergi yang baik dan jangkauan yang merata dalam hal Pendidikan seks bagi para remaja di Indonesia. Pertemuan ini dapat difasilitasi oleh pihak pemerintah sebagai pemegang otoritas yang dapat memberikan panggilan resmi bagi LSM-LSM tersebut.

Di samping FOFI dan PKBI, ada beberapa LSM lainnya terkait isu remaja adalah IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) atau IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama). Salah satu tujuan IPPNU dan IPNU adalah “Terbentuknya kesempurnaan pelajar Indonesia yg bertaqwa kepada Allah, berilmu dan berakhlakul karimah.” Adapula Pemuda Muhammadiyah, yang salah tujuannya adalah “menghimpun, membina, dan menggerakkan potensi Pemuda Islam.” Dorongan moral dan pembinaan yang diberikan dalam komunitas-komunitas seperti ini diharapkan dapat mendukung para remaja untuk tidak melakukan seks pranikah. Di samping itu, ada forum Jambore Pemuda Masjid, yang merupakan kumpulan organisasi-organisasi pemuda di setiap masjid.

Dalam kisah Yusuf, ia berlari ketika digoda oleh isteri Potifar. Dalam kaitannya dengan para siswa, lari mungkin berarti keluar dari komunitas pertemanan yang selama ini memberi pengaruh negatif, untuk kemudian bergabung dengan komunitas yang positif. Hal ini mengingatkan bahwa para remaja sangat rentan terhadap pengaruh “peer pressure.” Organisasi atau LSM di atas dapat menjadi komunitas yang sehat bagi para remaja.

4. Saran untuk Media

Untuk media, baik itu media sosial, televisi, majalah dan media lainnya, dibutuhkan kesadaran untuk bersama-sama memberikan pendidikan seks melalui iklan atau program khusus. Iklan yang dimaksud dapat mengenai menjaga batasan persahabatan dan pertemanan yang sopan, atau iklan yang mendorong fokus remaja pada prestasi sekolah mereka, dan bukan pada kegiatan pacaran. Program-program khusus dapat berupa dokumenter mengenai kegiatan para remaja yang berprestasi atau kegiatan positif lainnya. Dibutuhkan juga film-film seperti “Dua Garis Biru,” mengenai remaja dan kehidupan seksual mereka. Para pelaku media juga dapat memberikan pengarahan bagi para pendidik dan LSM untuk membuat vlog atau video singkat yang menarik terkait topik pendidikan seks. Televisi dan radio dapat memberikan iklan layanan sosial untuk hal ini.

5. Saran untuk Orangtua

Untuk para orangtua, penulis mendorong agar para orangtua memiliki keterbukaan untuk mendiskusikan, bahkan memulai pembicaraan terkait hal-hal seksual dengan anak-anak dan remaja mereka. Diharapkan dengan demikian para remaja tidak mencari jawaban di luar yang berpotensi menyesatkan, contohnya orang lain (teman) yang sama-sama tidak mengerti, atau bahkan membuka situs pornografi untuk “belajar” mengenai seks. Perasaan malu atau budaya tabu tidak dapat lagi dipertahankan, meningkat zaman sudah berubah dan para remaja dapat mengakses pornografi dalam sekali klik. Para orangtua juga perlu secara proaktif mencari dan menghadiri seminar-seminar mengenai bagaimana menyampaikan pendidikan seks bagi anak-anak mereka. Namun demikian, diskusi mengenai seksualitas tidak akan

terjadi begitu saja, bila orangtua tidak menyediakan waktu untuk berdiskusi mengenai hal-hal lain. Kedekatan remaja dengan para orangtua dibangun dengan pembicaraan-pembicaraan sehari-hari yang nampak sepele. Ketika orangtua menyediakan waktu dan kepeduliannya, maka para remaja memiliki keberanian untuk bertanya hal-hal seputar seks. Bila orangtua tidak memiliki waktu untuk mendiskusikan hal-hal sepele atau topik-topik sehari-hari, maka sulit diharapkan bahwa mendadak anak mereka akan berani bertanya mengenai topik seks. Mengaca pada kisah Yusuf dalam Kitab Kejadian, dalam usia yang relatif muda, sekitar 15 tahun, prinsip dan pandangan hidup Yusuf telah terbentuk, mengikuti pandangan (*worldview*) Yahudi yang takut akan Allah, walaupun ia saat itu hidup dalam budaya yang berbeda. Dengan demikian, para orangtua perlu membentuk pandangan hidup remaja mereka sejak dini, sehingga sebelum usia remaja, pandangan hidup dan nilai-nilai mereka telah terbentuk, sesuai dengan ayat: “Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanyapun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu.” (Amsal 22:6)

6. Saran untuk STTIH

Untuk Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest (STTIH), tempat penulis belajar, usulan yang penulis sampaikan adalah untuk melatih para teolog dan calon hamba Tuhan dalam topik seksualitas, mengingat dunia yang akan mereka hadapi adalah dunia yang menekankan seks. Terutama bagi para calon hamba Tuhan yang akan melayani para pemuda, mereka perlu mengerti bagaimana menyampaikan pendidikan seks yang mencakup tiga dimensi pembelajaran (kognitif, afektif, dan behavioral) pada para remaja. Para calon hamba Tuhan ini juga perlu memaparkan pendidikan seks dari sisi yang positif. Hanya dengan cara demikian, pendidikan seks

akan menjadi efektif, dan tidak hanya “menakut-nakuti” dalam batasan moralitas dan agama saja.

Pertanyaannya, apakah dalam STTIH ada pelajaran mengenai pendidikan seks? Beberapa hal yang perlu dipaparkan adalah aspek kognitif seperti informasi mengenai seksualitas, seperti Yusuf yang mengerti apa arti ajakan isteri Potifar untuk “tidur,” yaitu hubungan seksual, bukan sekedar beristirahat di ranjang. Termasuk di dalamnya informasi mengenai risiko seks pranikah. Aspek lain yaitu dimensi afektif sekaligus behavioral, untuk menanamkan ketegasan dan keberanian seperti Yusuf yang memiliki keberanian untuk berkata tidak. (Kej. 39:8) lalu mengambil tindakan yang sesuai. Yusuf memiliki ketegasan (*assertive*), yaitu ia berani berkata dengan terus terang apa yang ia putuskan (atau inginkan) dengan tetap menghormati lawan bicaranya.

Kelas atau pembahasan mengenai seksualitas perlu dimasukkan dalam kurikulum STT mengingat dunia saat ini adalah dunia yang sangat “seksual.” Bukan hanya mengenai seksualitas remaja, tetapi juga LGBTQ, transgender, dan lainnya.

7. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, penulis sarankan untuk meneliti hubungan antara pendidikan seks dan komitmen siswa untuk menjaga kesucian, atau tidak melakukan seks pra nikah. Mengingat penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini hanya meneliti implementasi dari pendidikan seks di Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia. Penelitian juga dapat diperluas untuk meneliti siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri atau remaja pada umumnya (antara usia 12-18 tahun) mengingat para remaja ini telah rentan terpapar pornografi yang terbukti meningkatkan dorongan untuk melakukan hubungan seks pranikah.